LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING

STUDI EMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI DI DIY

Tahun Ke 1 dari Rencana 3 Tahun

KETUA:
Eny Kusdarini, SH. M.Hum NIDN: 0004036006

ANGGOTA:
Setiati Widihastuti, SH. M.Hum NIDN: 00028036005
Candra Dewi Puspitasari, SH. LL.M NIDN: 0002078006

Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibang Bersaing Tahun Anggaran 2013 Nomor: 447a/HB-Multitahun/UN34.21/2013 Mei 2013

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOVEMBER 2013

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan pelaksanaan asas-asas umum yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Pelayanan Publik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) mengidentifikasi implemenyasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY; 3) mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas- asas umum yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di Propinsi DIY.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio-legal riset* dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam pelayanan publik perijinan investasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan *Focus Group Discussion.* Subjek ini adalah pejabat/staff Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat/staff Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian, masyarakat yang pernah dan sedang memperoleh layanan publik perijinan investasi di DIY serta narasumber yang ahli di bidang kajian asas-asas umum pemerintahan yang baik.. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan layanan perizinan investasi. Di Kota Yogyakarta kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota sudah memperlihatkan secara eksplisit maupun secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Sleman kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati belum banyak yang memperlihatkan secara eksplisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian secara implisit sudah terlihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.